



PEDOMAN PELAKSANAAN



SIP-POL SINERGI PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK

1. LATAR BELAKANG

Terdapat dua poin penting dalam meningkatkan partisipasi pemilih yakni melalui masyarakat sebagai pemilih dan juga melalui peningkatan kualitas kandidat calon kepala daerah. Meningkatkan hal tersebut tentunya bukan hanya menjadi tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali tetapi harus melibatkan stakeholder terkait. Sehingga dalam melaksanakan tugas pengembangan kehidupan demokrasi melalui pendidikan politik baik kepada masyarakat maupun kepada kader partai politik untuk melahirkan kandidat yang memiliki kualitas yang mampu memimpin masyarakat, tentu harus dibarengi dengan sinergi dari berbagai *stakeholder* terkait. Sinergi tersebut khususnya dalam mendukung Pengembangan kehidupan demokrasi melalui pendidikan politik yang berlandaskan ajaran Pancasila dengan menggaungkan nilai-nilai Pancasila ke berbagai *stakeholder* yang dimiliki. Salah satu Nilai Pancasila adalah semangat gotong-royong yang dilakukan dengan berbagai *stakeholder* mitra kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali. *Stakeholder* menjadi salah satu potensi yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali. Salah satunya adalah *Stakeholder* yang bergerak di bidang politik seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Partai Politik yang juga melaksanakan kegiatan untuk menjaga dan mengembangkan kehidupan berdemokrasi di daerah. Namun kondisi saat ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali dengan *stakeholder* sebatas hanya menjalankan perannya masing-masing, tanpa adanya sinergi atau persatuan dan kesatuan dalam melaksanakan pendidikan politik tersebut. Hal tersebut menjadikan pendidikan politik yang dilaksanakan menjadi kurang efektif dan efisien. Sehingga berdasarkan hal tersebut perlu dibuatkannya Inovasi “**Sinergitas Pelaksanaan Pendidikan Politik (SIP-POL)**”.

Inovasi tersebut digagas berdasarkan Jiwa Nasionalisme dan Gotong- Royong yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Selain itu inovasi tersebut digagas sesuai nilai Kearifan Budaya Bali yaitu “***Sagilik saguluk salunglung sabayantaka***” yang dalam bahasa Bali berarti bersatu-padu, menghargai pendapat orang lain, dan saling mengingatkan, menyayangi, serta hidup saling tolong-menolong. Hal ini menekankan pentingnya kebersamaan, toleransi, dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Besarnya dasar budaya yang melandasi pelaksanaan inovasi tersebut sehingga jika dilaksanakan dengan bersinergi bersama *Stakeholder* terkait maka akan memberikan hasil yang lebih besar. Salah satunya adalah terdapat satu arah dan satu

tujuan dalam mengembangkan kehidupan berdemokrasi di daerah melalui pendidikan politik kepada masyarakat.

2. TUJUAN KEGIATAN

- a. Untuk mewujudkan sinergi antar KPU Provinsi Bali, Bawaslu Provinsi Bali dan Partai Politik untuk melaksanakan pendidikan politik dalam bentuk Berita Acara Kesepakatan Pendidikan Politik, SOP Pelaksanaan Pendidikan Politik bersama *Stakeholder* dan Surat Keputusan (SK) Tim Kerja Pendidikan Politik di Daerah.
- b. Untuk menyempurnakan Konektivitas dan Integrasi Pengembangan Sistem dan Prosedur pendidikan politik dengan melibatkan berbagai *Stakeholder* terkait.
- c. Untuk meningkatkan pengembangan kehidupan demokrasi masyarakat yang dicerminkan dari peningkatan Nilai Indeks Demokrasi Provinsi (IDI) dan peningkatan tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah.

3. RUANG LINGKUP INOVASI

Berdasarkan permasalahan dalam latar belakang maka gagasan inovasi yang akan disusun untuk mengatasi dari permasalahan tersebut adalah **“Sinergitas Pelaksanaan Pendidikan Politik (SIP-POL)”**. Inovasi ini akan melahirkan sinergi, dan komitmen dari semua *Stakeholder* dalam Pendidikan politik ke masyarakat. Dimana inovasi ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali dengan *stakeholder* tidak hanya sebatas menjalankan perannya masing-masing, namun akan menciptakan sinergi atau persatuan dan kesatuan dalam melaksanakan pendidikan politik tersebut. Sinergi tersebut akan menciptakan satu arah dan satu tujuan dalam meningkatkan literasi politik masyarakat yang berdampak lebih luas dibandingkan jika hanya dilaksanakan sendiri-sendiri. Hal tersebut menjadikan pendidikan politik yang dilaksanakan lebih efektif dan efisien.

4. STAKEHOLDER

Stakeholder dari inovasi Sinergitas Pelaksanaan Pendidikan Politik (SIP-POL) adalah Lembaga Legislatif (DPRD), Inspektorat Provinsi Bali, Bappeda Provinsi Bali, Disdikpora Provinsi Bali, KPU Provinsi Bali, Bawaslu Provinsi Bali, Partai Politik, Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Bali, Lembaga Pendidikan (SMA/SMK dan PTN/PTS), Akademisi, Organisasi Kemasyarakatan, Media Massa

5. DOKUMENTASI KEGIATAN

6.

